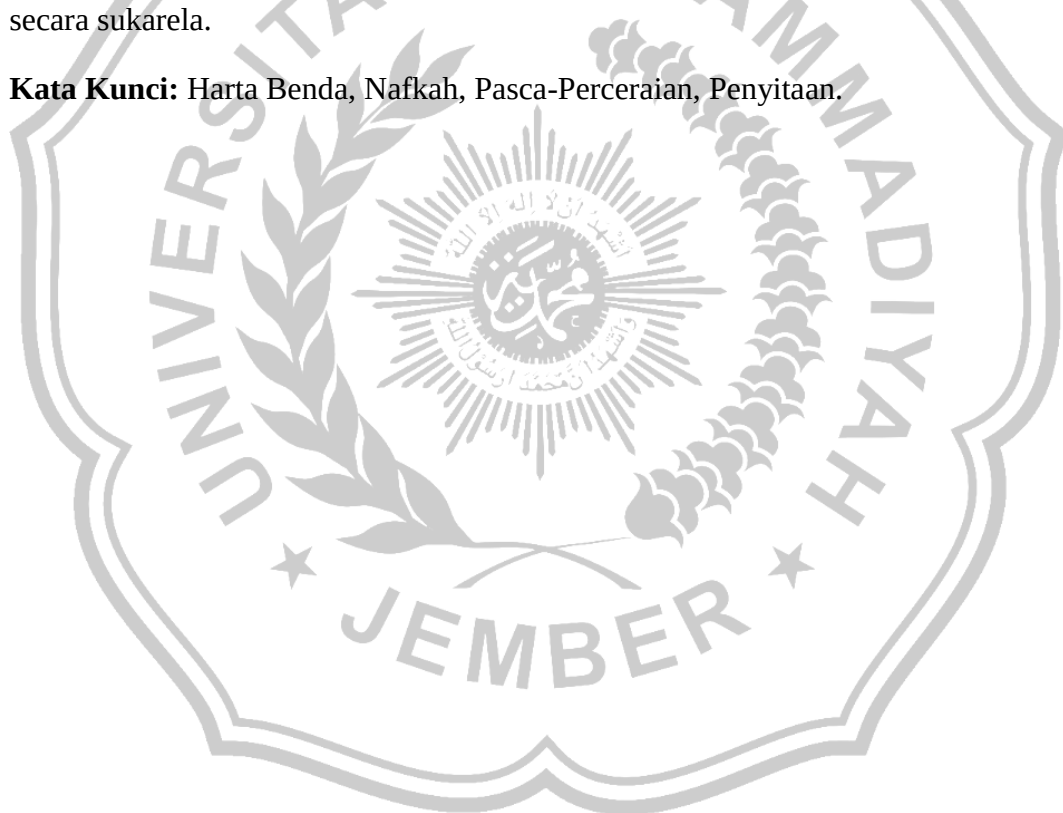


ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji mekanisme penyitaan terhadap harta benda milik mantan suami sebagai bentuk jaminan atas nafkah anak pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyitaan harta benda mantan suami dapat dilakukan sebagai bentuk eksekusi pembayaran sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Mekanisme eksekusi ini mencakup penyitaan aset bergerak dan tidak bergerak, kemudian dilanjutkan dengan penjualan melalui lelang untuk memenuhi kewajiban nafkah anak. Namun, terdapat pengecualian terhadap aset yang menjadi alat utama mata pencaharian mantan suami. Proses ini wajib diawali dengan pemberian peringatan (*aanmaning*) sebelum sita eksekusi dilakukan. Oleh karena itu, sita eksekusi merupakan solusi hukum yang efektif untuk menjamin hak nafkah anak, terutama ketika mantan suami tidak melaksanakan kewajiban secara sukarela.

Kata Kunci: Harta Benda, Nafkah, Pasca-Perceraian, Penyitaan.



ABSTRACT

Divorce often has an impact on a child, especially in terms of fulfilling the right to maintenance that should be the responsibility of the father even though the marriage bond has ended. The purpose of this study is to examine the mechanism of confiscation of the former husband's property as a form of guarantee for child support after divorce. This research uses a normative juridical research method with a statutory approach and conceptual approach. The results showed that confiscation of the ex-husband's property can be carried out as a form of execution of payment of a sum of money that has been determined in a court decision that has permanent legal force. This execution mechanism includes confiscation of movable and immovable assets, followed by sale through auction to fulfil child support obligations. However, there is an exception for assets that are the main means of livelihood of the ex-husband. This process must be preceded by the provision of a warning (aanmaning) before the execution seizure is carried out. Therefore, execution seizure is an effective legal solution to ensure the right to child support, especially when the ex-husband does not fulfil the obligation voluntarily.

Keywords: Property, Maintenance, Post-Divorce, Forfeiture.

